

**Eksistensi Masyarakat Lokal Yang Tergusur (Studi Kasus
Pembangunan Waduk Karangloe Desa Garing Kecamatan
Tompobulu Kabupen Gowa)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

M.Jufri Hs

10538 276013

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
2018**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259, (0411) 866132, Fax. (0411) 860132

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M.Jufri Hs**

Nim : 10538 276013

Jurusan : **Pendidikan Sosiologi**

Judul Skripsi : **Eksistensi Masyarakat Lokal Yang Tergusur**

(Studi Kasus Pembangunan Waduk Karangleoe

Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten

Gowa)

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya saya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, November

2017

Yang
Membuat
Perjanjian

M.Jufri Hs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259, (0411) 866132, Fax. (0411) 860132

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M.Jufri Hs**

Nim : 10538 2760 13

Jurusan : **Pendidikan Sosiologi**

Judul Skripsi : **Eksistensi Masyarakat Lokal Yang Tergusur
(Studi Kasus Pembangunan Waduk Karangleo
Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupen
Gowa)**

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesainya skripsi saya, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak melakukan penjiplatan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi ini.
4. Apabila saya melanggar perjanjian saya seperti butir 1, 2, dan 3, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Makassar, November

2017

Yang
Membuat
Perjanjian

M.Jufri Hs

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***KETIKA BUNGA MAWAR DIKALAHKAN OLEH KUNCI MOBIL
KETIKA DIRIMU DIKALAHKAN OLEH HAWA NAFSU
KETIKA KEPASTIAN DIKALAHKAN OLEH EGOISME YANG BERKEPANJANGAN***

***JANGAN PERNAH MELIHAT SESUATU DARI BENTUKNYA
KARENA HASIL INDRA MANUSIA BISA MENIPU
TAPI LIHATLAH DARI APA YANG BISA DI HASILKAN
JANGAN PERNAH MELIHAT MASALAH DI BALIK SOLUSI
TAPI LIHATLAH SOLUSI DI BALIK MASALAH***

***KARENA KENYAMANAN TIDAK SELAMANYA MENJANJIKAN KEINDAHAN
DAN KEINDAHAN TANPA KENYAMANAN BAGAIKAN HIDUP YANG TAK BERPRINSIP***

KUPERSEMBAHKAN KARYA INI BUAT :

***KEDUA ORANG TUAKU, SAUDARAKU, DAN
SAHABATKU , ATAS KEIKHLASAN DAN
DO'ANYA DALAM MENDUKUNG PENULISAN
UNTUK MEWUJUDKAN HARAPAN MENJADI
KENYATAAN.***

"PROSES HARI INI ADALAH LANGAKAH AWAL MENUJU KESUKSESAN DI HARI ESOK"

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan waduk merupakan salah satu bentuk pelestarian atau konservasi terhadap sumber daya air, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2010 tentang Bendungan pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya dilaksanakan sebagai upaya konservasi sumberdaya air”. Waduk itu sendiri adalah bendungan yang dibuat sengaja oleh manusia dengan maksud untuk menampung air yang nantinya dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Pembangunan Waduk Karangloe di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa dan masyarakat Kabupaten Jeneponto yang berada di perbatasan. Pembangunan Waduk Karangloe tersebut berfungsi sebagai penyedia air baku khususnya areal pertanian yang merupakan salah satu penyediaan padi regional maupun nasional. Bendungan waduk ini dibuat di wilayah Desa Garing Kecamatan Tompobulu, dan untuk area genangannya akan terbentuk meluas meliputi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Tompobulu dan kecamatan Biringbulu dan tiga Desa satu Kelurahan, yaitu Desa Garing, Desa Taring, Desa Datara dan Kelurahan Tonrorita. Lahan yang digunakan dalam pembangunan Waduk Karangloe tersebut terdiri dari lahan milik masyarakat dan

lahan milik pemerintah, lahan milik masyarakat terdiri dari sawah, kebun, permukiman sedangkan lahan milik pemerintah terdiri dari jalanan dan sungai.

Sebagian besar lahan yang digunakan dalam pembangunan waduk Karangloe adalah lahan milik masyarakat. Lahan milik masyarakat yang digunakan untuk pembangunan Waduk Karangloe sudah dibebaskan dan mendapat biaya ganti rugi dari pemerintah. Penggunaan lahan milik masyarakat sebagai area pembangunan waduk secara langsung memberikan suatu dampak bagi masyarakat itu sendiri, selain kehilangan tempat tinggal mereka juga kehilangan lapangan pekerjaan, karena sebagian besar lahan digunakan dalam pembangunan waduk.

Lahan yang digunakan dalam pembangunan Waduk Karangloe adalah lahan yang digunakan oleh masyarakat untuk mencari nafkah, seperti lahan pertanian dan lahan perkebunan, sehingga bagi masyarakat yang bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan harus bersiap diri untuk mencari lahan pengganti yang sudah dibebaskan dengan menggunakan uang ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah. Tidak sedikit masyarakat yang terkena dampak langsung dari pembangunan Waduk Karangloe tersebut dari ketiga desa dan satu kelurahan yang digenangi dapat diketahui bahwa Desa Garing menjadi salah satu desa yang terkena dampak yang cukup besar dari pembangunan Waduk Karangloe, sekitar 78 rumah yang tergusur dan 157 kepala keluarga di tiga desa dan satu kelurahan yang kehilangan lahan pertanian dan perkebunan.

Luas lahan yang sudah dibebaskan dalam tahap pertama untuk area genaganya sekitar 288 Ha. Pembebasan lahan milik masyarakat ini berdampak

pada mata pencaharian, sehingga dengan berubahnya mata pencaharian masyarakat tersebut dapat berpengaruh terhadap pendapatannya. Tergusurnya masyarakat Desa Garing yang menjadi korban dari pembangunan Waduk Karangloe membuat masyarakat harus bersiap diri memulai hidupnya kembali dari awal untuk mencari lapangan pekerjaan dan tempat tinggal.

Suatu proses pembangunan diharapkan bisa berdampak positif bagi masyarakat, namun tidak dapat dipungkiri dari setiap pembangunan juga dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Pembangunan Waduk Karangloe memberi dampak yang mempengaruhi sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak positifnya berupa perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat karena adanya uang ganti rugi, di mana masyarakat dapat membangun tempat tinggal yang lebih layak dari sebelumnya serta ada pula masyarakat yang menggunakan uang ganti rugi tersebut sebagai modal usaha. Pembebasan lahan adalah sarana utama untuk meningkatkan perkembangan ekonomi bagi masyarakat, pertanian dan perkebunan.

Lingkungan telah menjadi faktor kunci untuk kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak. Pengelolaan lingkungan yang baik terutama di lingkungan baru dapat membantu dalam mengatasi permasalahan kehidupan sosial ekonomi dengan adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Karena kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah didalam proses pembangunan waduk dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan bukan merugikan masyarakat.

Sedangkan dampak negatifnya berupa kerusakan lingkungan, hilangnya tempat tinggal, lahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin melakukan penelitian tentang ”Eksistensi Masyarakat Lokal yang Tergusur”(Studi Kasus Pembangunan Waduk Karangloe di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah eksistensi masyarakat lokal yang terdampak akibat pembangunan Waduk Karangloe di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimanakah dampak pembangunan Waduk Karangloe terhadap masyarakat lokal di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Dengan penelitian ini, maka ada beberapa tujuan yang ingin diperoleh, sebagai berikut

1. Untuk Mengetahui bagaimana eksistensi masyarakat lokal yang terdampak akibat pembangunan Waduk Karangloe di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa ?

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pembangunan Waduk Karangloe terhadap masyarakat lokal di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat (menjadi model) memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang pembangunan khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengalami penggusuran dengan mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan serta perubahan kepada masyarakat agar pembangunan waduk tersebut dimanfaatkan baik-baiknya.

- b. Bagi pemerintah

Penelitian ini di harapkan mampu menjadi model serta menjadi rumusan dari persoalan pembangunan Waduk Karangloe yang terjadi di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

- c. Bagi lembaga terkait

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada Badan Pertanahan Nasional dalam menangani pembangunan dan penggusuran terhadap masyarakat.

d. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah referensi sebagai bahan kajian tentang eksistensi masyarakat yang terdusur dan menjadi proses penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hasil penelitian yang relevan

Dalam sub-sub ini akan dijabarkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta akan dicari persamaan dan perbedaannya untuk menghindari adanya penduplikasian penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Fajar Isnawansyah terkait, *Kesiapan Masyarakat dalam Menghadapi Rencana Pembangunan Waduk Kuningan*. Rencana pembangunan Waduk Kuningan merupakan suatu bentuk konkrit pemerintah Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai upaya konservasi terhadap sumberdaya air. Letak pembangunan Waduk Kuningan berada di Kecamatan Cibeureum dan Karangkencana yang terdiri dari lima desa, salah satu desa yang akan terkena pembangunan Waduk Kuningan adalah Desa Kawungsari. Desa Kawungsari menjadi salah satu desa yang paling luas lahannya untuk pembangunan Waduk Kuningan, sehingga ada sebanyak 277 kepala keluarga di Desa Kawungsari akan tergusur sebagai dampak dari penggunaan lahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan dari masyarakat Desa Kawungsari dalam menghadapi pembangunan Waduk Kuningan, dengan melihat tiga indikator, yaitu pengetahuan, sikap, dan respon dari masyarakat terhadap

rencana pembangunan Waduk Kuningan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga di Desa Kawungsari yang akan terkena pembangunan Waduk Kuningan yaitu ada sebanyak 277 kepala keluarga dan sampel respondennya berjumlah 73 kepala keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Kawungsari telah mengetahui rencana pembangunan Waduk Kuningan, yang bersumber dari hasil sosialisasi pihak pemerintah. Sikap masyarakat sangat mendukung terhadap rencana pembangunan Waduk Kuningan ini, yang meliputi kesiapan untuk membebaskan lahan, dan mendukung adanya pelatihan keterampilan. Respon masyarakat bersedia untuk pindah ke tempat relokasi, dan mempersiapkan suatu keterampilan kerja. Dengan demikian masyarakat Desa Kawungsari memiliki kesiapan dalam menghadapi rencana pembangunan Waduk Kuningan.

Penelitian di atas memberikan keterkaitan dan kesamaan dari aspek dampak dan pengaruh di masyarakat terhadap pembuatan waduk itu sendiri dan adapun menjadi batasan pembeda dalam penelitian di atas ini, peneliti mencoba mengkaji sebuah konsep penarikan masalah berupa bentuk eksistensi masyarakat lokal yang terdusur dari pembangunan Waduk Karangloe.

Penelitian yang dilakukan oleh Muthi Amilia terkait, *Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigede Di Desa Wado*. Penelitian ini membahas konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Jatigede di Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui bagaimana proses pembebasan lahan di Desa Wado, faktor yang melatar belakangi konflik pembebasan lahan, dampak konflik pembebasan lahan, serta upaya penyelesaian konflik pembebasan lahan pembangunan bendungan Jatigede di Desa Wado. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak panitia pembebasan lahan, aparat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang terkena dampak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembebasan lahan memicu terjadinya konflik horizontal dan konflik vertikal yang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan individu serta berdampak pada sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Partisipasi aktif dan kerjasama merupakan upaya yang paling efektif dalam mengatasi konflik pembebasan lahan pembangunan Bendungan Jatigede.

Penelitian di atas memberikan keterkaitan dan kesamaan dari aspek terjadinya konflik di masyarakat, pembebasan lahan dan bentuk pembangunan bendungan dalam analisis pembuatan bendungan itu sendiri dan adapun menjadi batasan pembeda dalam penelitian di atas ini, peneliti mencoba mengkaji sebuah konsep penarikan masalah berupa bentuk eksistensi masyarakat lokal yang tergusur baik itu pengaruh dan dampak dari pembangunan Waduk Karangloe.

2. Pengertian eksistensi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Sedangkan menurut Abidin Zaenal (2007:16) “Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau

mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *exsistere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”.

Menurut Nadia Juli Indrani, eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu: keberadaan. Dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai arti yang luas dan dapat berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari seperti di bidang moral, agama dan lain sebagainya.

Eksistensi dalam tulisan ini juga memiliki arti yang berbeda, eksistensi yang dimaksud adalah mengenai keberadaan aturan atau hukum yang mengakibatkan perubahannya suatu hal. Hukum dan pidana kaitannya sangatlah erat, dimana ada hukum pasti ada pidana, namun keduanya memiliki makna yang berbeda.

Eksistensi bukanlah suatu yang sudah selesai, tapi suatu proses terus menerus melalui tiga tahap, yaitu : dari tahap eksistensi estetis kemudian ke tahap etis, dan selanjutnya melakukan lompatan ke tahap eksistensi religius sebagai tujuan akhir.

3. Masyarakat dan Masyarakat Lokal

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi.

Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: (1) Interaksi antar warga-warganya; (2) Adat istiadat; (3) Kontinuitas waktu; (4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118).

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page (dalam Soekanto 2006: 22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton (dalam Soekanto, 2006: 22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka

dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soekanto, 2006: 22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 1984: 11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.

Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya (Soekanto, 2006: 22). Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *society*. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Masyarakat lokal adalah kelompok sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. (pasal 1 angka 34 uu nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilaya pesisir dan pulau-pulau kecil) Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu. (Pasal 1 Angka 34 UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil).

4. Pengertian Penggusuran

Penggusuran adalah pengusiran paksa baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap penduduk yang menggunakan sumber-daya lahan Penggusuran untuk keperluan hunian maupun usaha.

Penggusuran terjadi di wilayah urban karena keterbatasan dan mahalnnya lahan. Di wilayah rural penggusuran biasanya terjadi atas nama pembangunan proyek prasarana besar seperti misalnya bendungan.

Di kota besar, penggusuran kampung miskin menyebabkan rusaknya jaringan sosial pertetangga dan keluarga, merusak kestabilan kehidupan keseharia.

5. Pengertian Pembangunan waduk

Waduk menurut pengertian umum adalah tempat pada permukaan tanah yang digunakan untuk menampung air saat terjadi kelebihan air / musim penghujan sehingga air itu dapat dimanfaatkan pada musim kering. Sumber air

waduk terutama berasal dari aliran permukaan ditambah dengan air hujan langsung.

Definisi lain mengatakan waduk adalah danau alam atau danau buatan, kolam penyimpanan atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air. Waduk dapat dibangun di lembah sungai pada saat pembangunan sebuah bendungan atau penggalian tanah atau teknik konstruksi konvensional seperti pembuatan tembok atau menuang beton. Istilah 'reservoir' dapat juga digunakan untuk menjelaskan penyimpanan air di dalam tanah seperti sumber air di bawah sumur minyak atau sumur air.

Jenis-jenis waduk diantaranya mempunyai fungsi serta kegunaan dalam memenuhi aktifitas masyarakat kehariannya diantaranya:

a. Waduk Lembah

Bendungan juga dibangun di lembah dengan memanfaatkan topografinya dan mendapatkan air untuk waduk. Bagian pinggir lembah dimanfaatkan sebagai tembok dan bendungannya terletak di bagian yang paling sempit, yang biasanya memberikan kekuatan lebih besar dengan biaya yang lebih rendah. Di banyak tempat, pembangunan waduk lembah melibatkan pemindahan penduduk dan artifak bersejarah, seperti misalnya pemindahan kuil Abu Simbel saat pembangunan Bendungan Aswan.

b. Waduk Sisi Sungai

Waduk sisi sungai dibangun dengan memompa air dari sungai. Waduk seperti ini biasanya dibangun melalui eskavasi dan konstruksi pada bagian tanggul yang biasanya mencakup lebih dari 6 km. Air yang disimpan di waduk seperti ini

biasanya diendapkan selama beberapa bulan agar kontaminasi dan tingkat kekeruhannya berkurang secara alami.

c. Waduk Pelayanan

Waduk pelayanan adalah waduk yang dibangun dekat dengan titik distribusi, dengan air yang sudah disterilkan dan dibersihkan. Waduk pelayanan biasanya dibangun berbentuk menara air yang dibangun di atas pilar beton di wilayah datar. Beberapa lainnya dibangun di bawah tanah, terutama untuk waduk pelayanan di negara-negara yang dipenuhi bukit atau pegunungan.

Fungsi waduk memberikan peranan tersendiri buat kebutuhan masyarakat terkait pemanfaatannya diantaranya :

a. Irigasi

Pada saat musim penghujan, hujan yang turun di daerah tangkapan air sebagian besar akan mengalir ke sungai. Kelebihan air yang terjadi dapat di tampung waduk sebagai persediaan sehingga pada saat musim kemarau tiba air tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan antara lain irigasi lahan pertanian

b. PLTA

Dalam menjalankan fungsinya sebagai PLTA, waduk dikelola untuk mendapatkan kapasitas listrik yang dibutuhkan. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah suatu system pembangkit listrik yang biasanya terintegrasi dalam bendungan dengan memanfaatkan energi mekanis aliran air untuk memutar turbin yang kemudian akan diubah menjadi tenaga listrik oleh generator.

c. Penyediaan air baku

Air baku adalah air bersih yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan air rumah tangga. Waduk selain sebagai sumber pengairan persawahan juga dimanfaatkan sebagai sumber penyediaan air baku untuk bahan baku air minum dan air rumah tangga. Air yang dipakai harus memenuhi persyaratan sesuai kegunaannya.

6. Landasan Teori

a. Teori pembangunan

Pembangunan sosial menurut Midgley (1995; 250) adalah *“a process of planner social change designed to promote the well-being of thw population as a whole in conjunction with a dynamic process of development”*. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Midgley tersebut terlihat bahwa pembangunan sosial ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat.

Peningkatan taraf hidup masyarakat tersebut tidak dapat dilakukan tanpa adanya keterkaitan dengan pembangunan ekonomi. Jadi pokok pikiran dari Midgley bahwa pembangunan sosial tidak akan dapat dijalankan tanpa adanya keterpaduan dengan pembangunan ekonomi. Perencanaan dalam pembangunan sosial harus juga membuat perencanaan pembangunan ekonomi.

Selanjutnya Edi Suharto mengartikan pembangunan sosial sebagai suatu pendekatan pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.

Berdasarkan definisi dari Edi Suharto tersebut terlihat bahwa pembangunan sosial lebih kepada meningkatkan keadilan terhadap semua anggota masyarakat. Jadi pembangunan sosial adalah proses pembangunan yang direncanakan dan diselaraskan dengan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan keadilan. Untuk melihat suatu pembangunan mempunyai dimensi pembangunan sosial dapat dilihat dari karakteristik pembangunan sosial itu sendiri.

Karakteristik dari pembangunan sosial adalah :

- 1) Proses dari pembangunan sosial yang dilakukan tidak terlepas dari pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan sosial tidak akan terlepas dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Tujuan dari pembangunan sosial hanya akan tercapai jika pembangunan ekonomi berkembang.
- 2) Pembangunan sosial yang dilakukan harus melibatkan berbagai macam disiplin ilmu khususnya ilmu sosial. keberhasilan pembangunan sosial tidak akan terlepas dari peran politik dan ekonomi dari suatu negara. Selain itu juga pembangunan sosial sangat dipengaruhi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
- 3) Tekanan dari pembangunan sosial lebih kepada proses yang dilakukan dalam pembangunan sosial itu sendiri. Dengan demikian dalam pembangunan sosial harus dilihat tiga aspek yaitu kondisi awal sebelum adanya pembangunan sosial, proses pembangunan itu sendiri

yang merupakan proses perubahan sosial, dan kondisi akhir setelah perubahan sosial dilakukan.

- 4) Pembangunan sosial merupakan proses yang bersifat progresif, artinya pembangunan yang dilakukan merupakan proses yang bersifat dinamis untuk mencapai kemajuan. Pembangunan sosial diarahkan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.
- 5) Pembangunan sosial merupakan proses yang lebih bersifat intervensi. Ini berarti bahwa pembangunan sosial dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat adanya distorsi dari pembangunan itu sendiri. Distorsi dari pembangunan ini sendiri akan menjadi permasalahan yang harus diselesaikan dan pembangunan sosial inilah yang akan menyelesaikan distorsi dari pembangunan tadi.
- 6) Adanya strategi yang harus digunakan dalam pembangunan sosial untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi ini digunakan untuk melakukan intervensi akibat adanya distorsi pembangunan tadi. Strategi juga dapat digunakan untuk menghubungkan pembangunan sosial yang dilakukan dengan pembangunan ekonomi.
- 7) Ditinjau dari ruang lingkungannya, pembangunan sosial bersifat universal. Hal ini berarti bahwa pembangunan sosial ditujukan untuk seluruh masyarakat.
- 8) Pembangunan sosial yang dilakukan ditujukan untuk dapat mempromosikan atau mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial.

9) Tujuan dari pembangunan sosial ini lebih luas dibandingkan dengan pembangunan ekonpomi, sehingga untuk mencapainya diperlukan strategi khusus. Strategi yang digunakan dalam pembangunan sosial menurut Midgley (1995; 103-138) adalah :

- 1) Pembangunan sosial melalui individu dengan pendekatan individualis. Strategi ini kurang populer dalam pembangunan sosial, karena lebih menekannya pada pengembangan dan fungsi individu serta hubungan antarindividu. Individu-individu yang ada dalam masyarakat berswadaya memberdayakan masyarakat itu sendiri dengan membentuk usaha pelayanan. Dengan adanya usaha membentuk pelayanan yang bersifat swadaya tadi maka strategi ini sering juga disebut juga sebagai pendekatan perusahaan (enterprise approach)
- 2) Pembangunan sosial melalui komunitas, dikenal juga dengan pendekatan komunitarian. Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh ideology populis. Dalam strategi ini kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat mencoba untuk saling berhubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok. Kerja sama antarkelompo itu akan menghasilkan jaringan kelompok yang selanjutnya digunakan untuk pengembangan kelompok lokal yang ada dalam masyarakat.
- 3) Pembangunan sosial melalui pemerintah, yang sering dikenal dengan pendekatan statis. Pendekatan ini sangat lekat dengan ideology kolektivis atau sosialis. Ideology ini menekankan betapa pentingnya

kolektivitas. Pembangunan sosial dilakukan dengan menggunakan lembaga-lembaga yang ada di dalam organisasi pemerintah. Pada strategi ini pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk membuat kebijakan dan mengimplementasikan kebijakan sosial yang telah dibuat. Jadi dengan demikian partisipasi dalam pembangunan sosial tidak hanya dilakukan oleh individu dan masyarakat, tetapi juga oleh pemerintah.

Hubungan yang erat antara pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan menjadikan keduanya tidak akan terlepas dari pembangunan ekonomi. Kolaborasi antara pembangunan sosial (dalam hal ini sebagai pembangunan kesejahteraan sosial) dengan pembangunan ekonomi akan memperlihatkan sebuah negara apakah termasuk negara sejahtera atau negara tidak sejahtera. Hill (1996) mengategorikan negara-negara menjadi empat kategori yang didasarkan pada tingkat pembangunan ekonomi yang dilihat dari Gross Domestic Product (GDP) dan tingkat pembangunan sosial yang dilihat dari persentase pengeluaran negara untuk pembangunan sosial terhadap GDP.

Keterkaitan teori pembangunan menunjukkan adanya penyelesaian dalam menganalisis masalah pertama yaitu bagaimana eksistensi masyarakat lokal yang tergusur akibat pembangunan Waduk Karangloe di Desa Garing Kecamatan Tompobulu.

b. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori ini menekankan kepada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik serta perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan .

Teori fungsionalisme struktural, yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons, merupakan teori dalam paradigma fakta sosial dan paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang, sehingga dapat disinonimkan dengan sosiologi (Ritzer, 2005:117). Teori ini memfokuskan kajian pada struktur makro (sosiologi makro) yakni pada sistem sosial, yang melalui teori ini Parsons menunjukkan pergeseran dari teori tindakan ke fungsionalisme struktural. Kekuatan teoretis Parsons terletak pada kemampuannya melukiskan hubungan antara struktur sosial berskala besar dan pranata sosial (Ritzer 2005:82). Bangunan teori fungsionalisme struktural Parsons banyak terpengaruh oleh pemikiran Durkheim, Weber, Freud dan Pareto, dan yang disebut terakhir inilah yang paling besar pengaruhnya bagi pengembangan teori fungsionalisme struktural, terutama gagasan Pareto tentang masyarakat yang dilihatnya dalam hubungan sistem (Ritzer, 2011:280). Konsepsi Pareto yang sistematis tentang masyarakat, yang dipandanginya sebagai sebuah sistem yang berada dalam keseimbangan, yakni kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung, sehingga perubahan satu bagian dipandang menyebabkan perubahan lain dari sistem, dan dilebur dengan pandangan Comte, Durkheim dan Spencer yang menganalogikan masyarakat dengan organisme, memainkan peran sentral dalam pengembangan teori fungsionalisme struktural Parsons (Ritzer, 2005:54-55).

Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam

keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Penganut teori ini cenderung untuk melihat hanya kepada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dapat menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Maka jika terjadi konflik, penganut teori fungsionalisme struktural memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan.

Singkatnya adalah masyarakat menurut kaca mata teori (fungsional) senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan. Setiap peristiwa dan setiap struktur fungsional bagi sistem sosial itu. Demikian pula semua institusi yang ada, diperlukan oleh sosial itu, bahkan kemiskinan serta kepincangan sosial sekalipun. Masyarakat dilihat dalam kondisi, dinamika dalam keseimbangan.

Keterkaitan teori struktural fungsional menunjukkan adanya penyelesaian dalam menganalisis masalah yaitu bagaimana dampak pembangunan Waduk Karangloe terhadap masyarakat lokal di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

c. Teori Konflik

Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Menurut Antonius, dkk (2002: 175)

konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Morton Deutsch, seorang pionir pendidikan resolusi konflik (Maftuh, 2005: 47) yang menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada oleh persamaan.

Teori ini dibangun dalam rangka untuk menentang teori Fungsionalisme Struktural. Karena itu tidak mengherankan apabila proposisi yang dikemukakan oleh penganutnya bertentangan dengan proposisi yang terdapat adalah Teori Fungsionalisme Struktural. Tokoh utama Teori Konflik adalah Ralp Dahrendorf.

Menurut Teori Fungsionalisme Struktural masyarakat berada dalam kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan, maka menurut Teori Konflik malah sebaliknya. Kalau menurut Teori Fungsionalisme Struktural setiap elemen satu setiap institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas, maka Teori Konflik melihat bahwa setiap elemen atau institusi memberikan sumbangan terhadap disintegrasikan sosial. Kontras lainnya adalah bahwa penganut Teori Fungsionalisme Struktural melihat anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum, maka Teori Konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan atas golongan yang berkuasa.

Dahrendorf membedakan golongan yang terlibat konflik itu atas dua tipe. Kelompok semu (*quasi group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*).

Kelompok semu merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok-kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok dua, yakni kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat.

Mengenai fungsi dari adanya konflik, Berghe mengemukakan ada empat hal: (1) Sebagai alat untuk solidaritas; (2) Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain; (3) Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi; (4) Fungsi komunikasi. Sebelum sebuah konflik kelompok tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Tapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Individu dan kelompok tahu secara pasti di mana mereka berdiri, dan karena itu dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak dengan lebih tepat.

Teori Konflik ini ternyata terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat dalam masyarakat di samping konflik itu sendiri. Masyarakat selalu dipandang dalam kondisi konflik. Mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya keseimbangan dalam masyarakat. Masyarakat seperti tidak pernah aman dari pertikaian dan pertentangan.

Keterkaitan teori konflik menunjukkan adanya penyelesaian dalam mengalisis masalah kedua yaitu bagaimana bagaimana dampak pembangunan

Waduk Karangloe terhadap masyarakat lokal di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

B. Kerangka Pikir

Pembangunan Waduk Karangloe di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa dan masyarakat Kabupaten Jeneponto yang berada di perbatasan. Pembangunan Waduk Karangloe tersebut berfungsi sebagai penyedia air baku khususnya area pertanian yang merupakan salah satu penyediaan padi regional maupun nasional. Bendungan waduk tersebut, dibuat di wilayah Desa Garing Kecamatan Tompobulu, dan untuk area genangannya akan terbentuk meluas meliputi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Tompobulu dan kecamatan Biringbulu dan tiga Desa satu Kelurahan, yaitu Desa Garing, Desa Taring, Desa Datara dan Kelurahan Tonrorita. Lahan yang digunakan dalam pembangunan Waduk Karangloe tersebut terdiri dari lahan milik masyarakat dan lahan milik pemerintah, lahan milik masyarakat terdiri dari sawah, kebun, permukiman sedangkan lahan milik pemerintah terdiri dari jalanan dan sungai.

Sebagian besar lahan yang digunakan dalam pembangunan waduk Karangloe adalah lahan milik masyarakat. Lahan milik masyarakat yang digunakan untuk pembangunan Waduk Karangloe sudah dibebaskan dan mendapat biaya ganti rugi dari pemerintah. Penggunaan lahan milik masyarakat sebagai area pembangunan waduk secara langsung memberikan suatu dampak bagi masyarakat itu sendiri, selain kehilangan tempat tinggal mereka juga

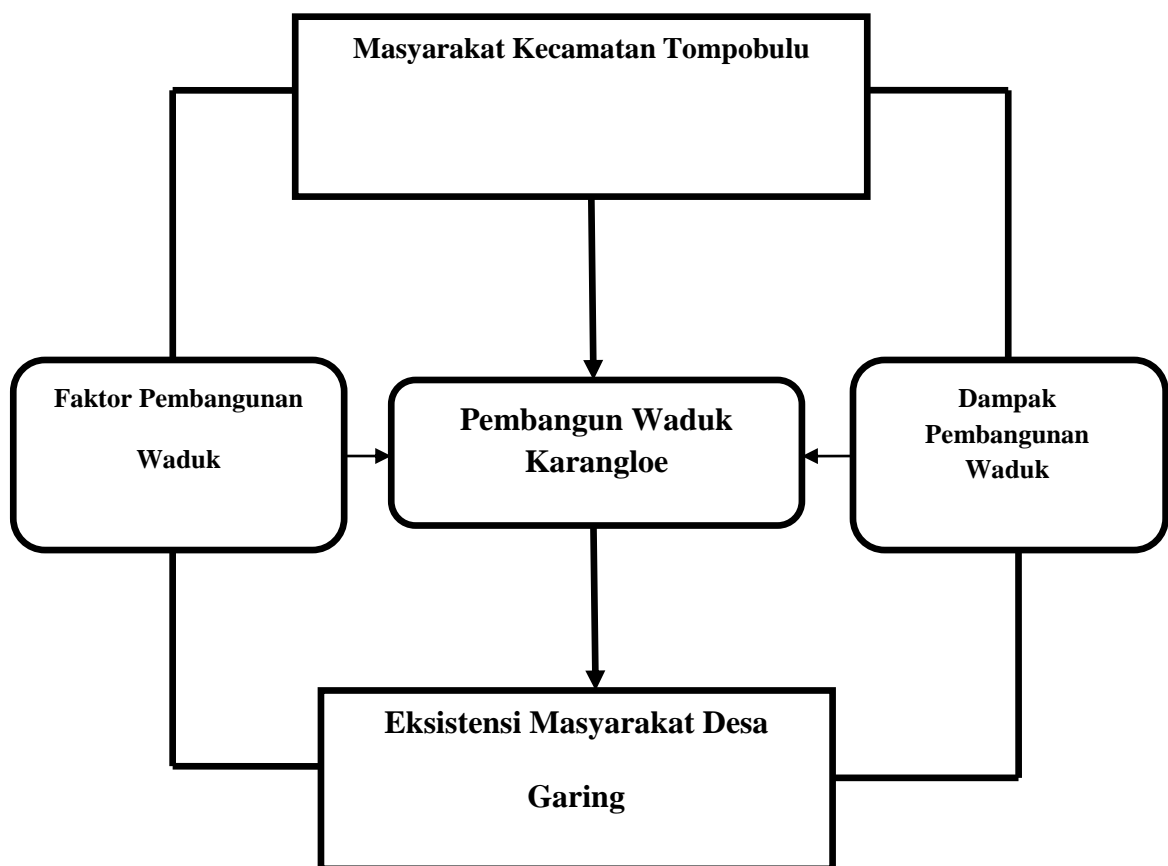
kehilangan lapangan pekerjaan, karena sebagian besar lahan digunakan dalam pembangunan waduk.

Lahan yang digunakan dalam pembangunan Waduk Karangloe adalah lahan yang digunakan oleh masyarakat untuk mencari nafkah, seperti lahan pertanian dan lahan perkebunan, sehingga bagi masyarakat yang bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan harus bersiap diri untuk mencari lahan pengganti yang sudah dibebaskan dengan menggunakan uang ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah. Tidak sedikit masyarakat yang terkena dampak langsung dari pembangunan Waduk Karangloe tersebut dari ketiga desa dan satu kelurahan yang digenangi dapat diketahui bahwa Desa Garing menjadi salah satu desa yang terkena dampak yang cukup besar dari pembangunan Waduk Karangloe, sekitar 78 rumah yang tergusur dan 157 kepala keluarga di tiga desa dan satu kelurahan yang kehilangan lahan pertanian dan perkebunan.

Lingkungan telah menjadi faktor kunci untuk kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak. Pengelolaan lingkungan yang baik terutama di lingkungan baru dapat membantu dalam mengatasi permasalahan kehidupan sosial ekonomi dengan adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Karena kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah didalam proses pembangunan waduk dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat dan bukan merugikan masyarakat.

Dengan memperhatikan perumusan masalah di atas, secara sederhana dapat disusun bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1.1. Bagang Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna *perspektif subjek* lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Sugiyono (2011:15), menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010: 1).

Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini. Dalam penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa/kondisi yang sedang diteliti. Untuk itu hasil dari penelitian ini memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Selain itu, hasil penelitian ini bersifat subjektif sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Secara umum, penelitian kualitatif dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Melalui metode ini, peneliti akan menganalisis data yang didapatkan dari lapangan dengan detail.

Dalam penelitian kualitatif, identitas dan peran informan serta informasi-informasi yang disampaikan menjadi hal-hal yang berharga sehingga peneliti harus memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan identitas diri dan informasi yang disampaikan oleh informan. Identitas dan informasi tersebut dapat dibuka atau tertutup untuk khalayak, tergantung dari kesepakatan antara peneliti dan informan yang tertulis dalam formulir kesepakatan (*consent form*). Peneliti boleh membuka identitas selama informan sepakat dan peneliti juga harus menghargai keputusan apabila informan ingin identitasnya dilindungi.

Dalam pengambilan data penelitian kualitatif, sebaiknya peneliti mendapatkan izin baik secara tertulis ataupun lisan sehingga penelitian tidak melanggar norma-norma yang mungkin dianut oleh informan atau objek penelitian.

B. Lokus Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Alasan judul lokasi di tetapkan, dengan pertimbangan keabsahan data dan bentuk relevansi dari penelitian yang di laksanakan peneliti.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian pada penelitian adalah masyarakat Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Model penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan model purposive sampling atau *judgmental sampling* salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Secara bahasa yaitu berarti sengaja. Purposive sampling berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

Pengambilan sampel berdasarkan "penilaian" peneliti mengenai siapa-siapa saja yang pantas (memenuhi persyaratan) untuk dijadikan sampel oleh karena itu latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel dimaksud (tentu juga populasinya) agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan

persyaratan atau tujuan peneliti yang sehingga mendapat atau memperoleh data yang akurat.

Syarat-syarat menentukan sampel pada purposive sampling yaitu: (1) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan; (2) Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi; (3) subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000: 97) atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu:

1. Pemerintah Setempat
2. Pengurus Pembangunan waduk karangloe
3. Masyarakat

D. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah pengaruh dan dampak pembangunan Waduk Karangloe terhadap pembangunan waduk di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kapabuten Gowa “Eksistensi Masyarakat Lokal Yang Tergusur Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kapabuten Gowa”.

E. Instrumen Penelitian

Pada umumnya penelitian akan berhasil apabila banyak menggunakan instrument, sebab data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan masalah penelitian dan menguji hipotesis dibutuhkan instrument. Menurut Suharsimi Arikunto instrument penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.

Adapun instrument atau alat yang diperlukan dalam penelitian seperti kamera, alat perekam, lembar obsevasi, dan penelitian sendiri.

1. Kamera

Kamera merupakan alat yang dipakai untuk mendapatkan informasi tentang kejadian yang telah terjadi di tempat melakukan penelitian mengenai berbagai gambar atau informasi lainnya.

2. Alat Perekam

Alat ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu informasi terhadap apa yang telah kita teliti terkait masalah penelitian.

3. Lembar Observasi

Lembar observasi adalah lembar kerja yang berfungsi untuk mengobservasi dan mengukur tingkat keberhasilan atas pencapaian tujuan dalam melakukan observasi.

F. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data yang didapatkan dari hasil wawancara atau observasi. Data dalam penelitian diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti sendiri, data yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi berupa hal-hal yang dapat dilihat secara kasat mata oleh peneliti kemudian dianalisis dalam bentuk deskripsi. Data hasil wawancara merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui dan bisa menjawab tentang hal-hal yang akan diteliti oleh peneliti. Maka dari hasil wawancara itu peneliti merumuskannya dengan menggunakan analisis *komparatif* sebagai bahan perbandingan tentang perubahan pola pikir masyarakat terhadap program bank sampah.

2. Data sekunder

Data yang didapatkan dari hasil telaah buku referensi atau dokumentasi. Data dalam penelitian diperoleh dari hasil telaah buku referensi atau dokumentasi yang dilakukan dilapangan oleh peneliti sendiri, data yang diperoleh dari hasil telaah buku referensi atau dokumentasi berupa hal-hal yang dapat dilihat secara kasat mata oleh peneliti kemudian dianalisis dalam bentuk deskripsi terkait tentang eksistensi masyarakat lokal yang tergusur desa garing kecamatan tompobulu kapabuten gowa.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi yang didapat dari data langsung lapangan melalui wawancara serta sumber yang didapat sebagai pelengkap diambil dari dokumen-dokumen baik yang ada di lapangan maupun yang ada diluar lapangan. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang didapat yaitu tentang cara digunakan dalam memecahkan masalah dengan menggunakan metode tertentu. Dalam kaitannya dengan penelitian ini pengumpulan data didasarkan atas metode, objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber, data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak data observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Tiga jenis teknik pengumpulan data yang disebutkan diatas akan dijelaskan dibawah ini:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti bertujuan untuk gambaran atau informasi tentang keadaan dan kegiatan manusia di daerah atau wilayah yang diteliti sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasution (1982: 123) observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif, peneliti datang ketempat kegiatan yang di amati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian instrument penelitian ialah peneliti itu sendiri, yang terlebih dahulu perlu sepenuhnya memahami dan adaptif dalam situasi yang dihadapi.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan keyakinan pribadi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan pariwisata yang sudah berlaku. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan semakin kredibel/dapat dipercaya apabila dukungan foto-foto, karya tulis, akademik, buku, jurnal, dan sejenisnya.

4. Partisipasif

Partisipasif adalah suatu gejala demokrasi dimana orang ikut serta dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajiban.

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Analisis data adalah proses yang mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data

di lakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Proses analisis data dimulai dengan penelaahan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari observasi, dokumentasi, dan wawancara yang telah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, dan foto. Data tersebut banyak sekali, setelah dibaca, dipelajari, dan telaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi. Langkah berikutnya adalah menyusun satuan-satuan, dalam hal ini Nasution (1988: 275) menyatakan bahwa analisis telah memulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus samapi penulisan hasil penelitian.

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Penelitian ini masih sementara dan akan dikembangkan setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

2. Analisis Data di Lapangan

Dapat dilakukan oleh peneliti setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, maka diperoleh data yang valid.

I. Teknik Keabsahan Data

Menguji keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi data, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

1. Triangulasi metode

Dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

2. Triangulasi antar peneliti

Dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi.

3. Triangulasi sumber data

Menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant obervation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

4. Triangulasi teori

Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

Dengan teknik ini diharapkan data yang dikumpulkan memenuhi *konstruk* penarikan kesimpulan. Kombinasi triangulasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan di lapangan, sehingga peneliti bisa melakukan pencatatan data secara lengkap. Dengan demikian, diharapkan data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan.

BAB IV

DESKRIPSI UMUM DAERAH PENELITIAN DAN DESKRIPSI KHUSUS LATAR PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Kabupaten Gowa sebagai Daerah Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa.

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² dan berpenduduk sebanyak 823.698 Jiwa. Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 Daerah Gowa terbentuk sebagai Daerah Swapraja dari 30 daerah Swapraja lainnya dalam pembentukan 13 Daerah Indonesia Bagian Timur.

Sejarah Pemerintahan Daerah Gowa berkembang sesuai dengan sistem pemerintahan negara. Setelah Indonesia Timur bubar dan negara berubah menjadi sistem Pemerintahan Parlemen berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 dan Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957, maka daerah Makassar bubar. Pada tanggal 17 Januari 1957 ditetapkan berdirinya kembali Daerah Gowa dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan ditetapkan sebagai daerah Tingkat II . Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 Januari 1957 telah dibentuk Daerah-daerah Tingkat II.

Dalam sejarah perkembangan pemerintahan dan pembangunan mulai dari zaman kerajaan sampai dengan era kemerdekaan dan reformasi, wilayah Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sebagai daerah agraris yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Gowa sebagai daerah pengembangan perumahan dan permukiman di Kota Makassar.

Kondisi ini secara gradual menjadikan daerah Kabupaten Gowa yang dulunya sebagai daerah agraris sentra pengembangan pertanian dan tanaman pangan yang sangat potensial, juga menjadi sentra pelayanan jasa dan perekonomian.

Dalam sejarah keberadaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II sejak tahun 1957 sampai sekarang telah mengalami 12 (dua belas) kali pergantian Bupati. 11 (sebelas) kali diantaranya berdasarkan pengangkatan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Satu kali berdasarkan hasil pemilihan secara langsung oleh rakyat Kabupaten Gowa.

2. Kondisi Geografis dan Iklim

a. Kondisi Geografis Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya

antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan.

- 1) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto
- 2) Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros,
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI



Gambar 4.1 Peta administrasi Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Gowa memiliki 16 kecamatan diantaranya, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Barombong, Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Bungaya, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Parangloe, Kecamatan

Parigi, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan
Tinggimoncong, Kecamatan Tombolo Pao, Kecamatan Tompobulu.

Untuk lebih jelasnya gambaran umum kecamatan yang ada dalam wilayah
Kabupaten Gowa berdasarkan komposisi luas dan jarak dari Sungguminasa
sebagai Ibukota Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

LUAS WILAYAH DAN KECAMATAN DI KABUPATEN GOWA

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak dari Ibukota Kab. (Km)	Luas Kecama- tan (Km ²)	% Thd Luas Kab.
1.	Bontonompo	Tamallayang	16	30,39	1,61
2.	Bontonompo Selatan	Pabundukang	30	29,24	1,55
3.	Bajeng	Kalebajeng	12	60,09	3,19
4.	Bajeng Barat	Borimatangkasa	15,80	19,04	1,01
5.	Pallangga	Mangalli	2,45	48,24	2,56
6.	Barombong	Kanjilo	6,5	20,67	1,10
7.	Somba Opu	Sungguminasa	0,00	28,09	1,49
8.	Bontomarannu	Borongloe	9	52,63	2,79
9.	Pattallassang	Pattallassang	13	84,96	4,51
10.	Parangloe	Lanna	27	221,26	11,75
11.	Manuju	Bilalang	20	91,90	4,88
12.	Tinggi Moncong	Malino	59	142,87	7,59
13.	Tombolo Pao	Tamaona	90	251,82	13,37
14.	Parigi	Majannang	70	132,76	7,05

15.	Bungaya	Sapaya	46	175,53	9,32
16.	Bontolempangan	Bontoloe	63	142,46	7,56
17.	Tompobulu	Malakaji	125	132,54	7,04
18.	Biringbulu	Lauwa	140	218,84	11,62
JUMLAH				1.883,33	100

Tabel 4.1 Ibu Kota Kecamatan, Jarak dan Luas Kecamatan Tahun 2017 (*Sumber: Kantor Kecamatan Tompobulu*).

b. Kondisi Iklim Kabupaten Gowa

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-Nopember. Kabupaten Gowa termasuk wilayah yang beriklim tropis yang panas dan lembab (beriklim tropika basah/Am). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Meteorologi dan Geofisika rata-rata Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.

3. Topografi, Geologi, dan Hidrologi

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu.

a. Topografi Kabupaten Gowa

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km.

b. Geologi Kabupaten Gowa

Secara geologi daerah ini tersusun oleh batuan-batuan sediment dan terobosan Formasi Camba yang berumur Tersier, batuan gunungapi dan terobosan yang termasuk dalam kelompok batuan Gunungapi Baturappe-Cindako berumur Tersier, batuan Gunung api Lompobatang yang berumur Kuartar, serta endapan alluvial. Daerah dataran yang merupakan daerah terendah di atas permukaan laut, umumnya ditempati oleh endapan alluvial. Kelompok batuan Formasi Camba dan batuan gunung api Tersier umumnya menempati daerah perbukitan dan hanya sebagian kecil yang berada di daerah dataran serta di daerah dataran bergelombang, sedangkan daerah pegunungan yang merupakan bagian tertinggi dalam wilayah Kabupaten Gowa tersusun oleh batuan gunung api Kuartar.

Daerah dataran yang umumnya tersusun oleh endapan alluvial merupakan wilayah air tanah produktivitas sedang-rendah. Sedangkan daerah yang tersusun oleh batuan sedimen Formasi Camba dan Batuan Gunungapi termasuk batuan terobosan berumur Tersier merupakan wilayah airtanah dengan produktivitas sangat rendah hingga langka air tanah.

Daerah pegunungan termasuk wilayah airtanah produktivitas sedang kecuali sebagian daerah di sekitar puncak merupakan wilayah air tanah langka. Bahan galian berupa pasir dan lempung banyak ditambang di daerah dataran terutama di daerah Bajeng, sedangkan sirtu di daerah lembah sungai Jeneberang di bagian hulu bendung Bili-Bili. Daerah bergelombang sering dibuat menjadi lebih landai bahkan datar dengan menggantinya sebagai tanah urug dan batu belah terutama di daerah yang tersusun oleh endapan gunung api tersier. Formasi Camba oleh para peneliti sebelumnya diinformasikan mengandung lapisan tipis batu bara, sedangkan intrusi batuan gunung api Baturappe-Cindako antara lain menghasilkan mineralisasi logam mulia.

c. Hidrologi Kabupaten Gowa

Wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km² dan panjang 90 Km.

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km² yang dapat menyediakan air

irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

4. Kondisi Demografi

Dilihat dari jumlah penduduk, Kabupaten Gowa termasuk kabupaten terbesar ketiga di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil Susenas 2007, penduduk Kabupaten Gowa tercatat sebesar 594.423 jiwa. Pada Tahun 2006 jumlah penduduk mencapai 586.069 jiwa, sehingga penduduk pada Tahun 2007 bertambah sebesar 1,43%.

Persebaran penduduk di Kabupaten Gowa pada 18 kecamatan bervariasi. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduk per kecamatan yang masih sangat timpang, untuk wilayah Somba Opu, Pallangga, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng dan Bajeng Barat, yang wilayahnya hanya 11,42% dari seluruh wilayah Kabupaten Gowa, dihuni oleh sekitar 54,45% penduduk Gowa. Sedangkan wilayah Kecamatan Bontomarannu, Pattallassang, Parangloe, Manuju, Barombong, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu, yang meliputi sekitar 88,58% wilayah Gowa hanya dihuni oleh sekitar 45,55% penduduk Gowa. Keadaan ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh faktor keadaan geografis daerah tersebut.

Bila dilihat dari kelompok umur, penduduk anak-anak (usia 0-14 tahun) jumlahnya mencapai 31,12%, sedangkan penduduk usia produktif mencapai 63,18% dan penduduk usia lanjut terdapat 5,70% dari jumlah penduduk di Kabupaten Gowa. Dilihat dari jenis kelamin, maka dari total jumlah penduduk

Kabupaten Gowa, terdapat 293.956 atau 49,45% laki-laki dan 300.467 atau 50,55% perempuan. Dengan demikian, secara keseluruhan penduduk laki-laki di Kabupaten Gowa jumlahnya lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan seperti yang tampak pada rasio jenis kelamin penduduk yang mencapai 98 artinya ada sejumlah 98 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

B. Deskripsi Khusus Kecamatan Tompobulu Desa Garing sebagai Latar Penelitian

1. Sejarah Singkat Kecamatan Tompobulu Desa Garing

Nama Kecamatan Tompobulu di Sulawesi Selatan (Sulsel) terdapat di beberapa kabupaten antara lain di Gowa, Maros, dan Bantaeng. Tompobulu secara etimologi berasal dari dua kata dalam bahasa Makassar yakni Tompo dan Bulu. Tompo bermakna puncak, ketinggian, atau di atas, sedangkan Bulu bermakna gunung. Dengan demikian Tompobulu dapat diartikan sebagai wilayah yang berada di pegunungan.

Terdapat beberapa akses mencapai kecamatan ini antara lain akses jalan Pallangga-Bungaya, jalan Palлеко (Takalar)-Biringbulu, dan Sungguminasa-Jeneponto. Akses utama yang digunakan warga sejak puluhan tahun silam akses terakhir jalan nasional yang menghubungkan Makassar ke Jeneponto, karena dua akses pertama kondisi jalannya masih kurang baik selain jalur itu dipenuhi tanjakan.

PROFIL KELURAHAN KECAMATAN TOMPOBULU

No	Desa / kelurahan	Luas (km ²)	Persentase
1	Garing	13.88	10.47
2	Bontobuddung	9.33	7.04
3	Tanete	22.91	17.29
4	Cikoro	17.33	13.08
5	Rappolemba	27.38	20.66
6	Rappoala	20.96	15.81
7	Malakaji	6.75	50.9
8	Malakaji	14.00	10.56
jumlah		132.54 km ²	145.81 %

Tabel 4.2 Jarak dan Luas Kelurahan Kecamatan Tompobulu Tahun 2013
(Sumber: Kantor Kecamatan Tompobulu).

Data tabel di atas menunjuk pembagian wilayah dan luas kelurahan yang ada di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

2. Tingkat Pendidikan

Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan yang makin bermutu. Secara Nasional, pendidikan diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Kehidupan masyarakat Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa sudah banyak dipengerahui oleh sistem pendidikan dan teknologi.

Sistem pendidikan yang semakin berkembang telah menyadarkan pola pikir masyarakat bahwa betapa pentingnya arti pendidikan bagi anak-anak mereka. Dengan demikian masyarakat Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa berusaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Beberapa fasilitas umum yang terdapat di Tompobulu seperti sarana pendidikan antara lain Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 6 unit, Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebanyak 11 unit, Sekolah Dasar Inpres (SDI) sebanyak 11 unit, Sekolah Menengah Pertama sebanyak lima unit, Sekolah Menengah Atas sebanyak satu unit. Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak enam unit, Madrasah Tsanawiah (MTs) sebanyak empat unit, dan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak tiga unit.

3. Mata Pencaharian

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan adanya potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, penduduk Tompobulu umumnya berprofesi sebagai petani padi, peternakan, palawija, dan berkebun kopi, sebagian warga bergerak pada usaha sektor non pertanian terutama perdagangan.

4. Kondisi Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk kecamatan Tompobulu (2013) sebesar 29.749 jiwa yang terdiri dari laki-laki 14.385 jiwa dan perempuan sebesar 15.364 jiwa dengan jumlah rumah tangga 7.534. Sumber penghasilan utama penduduk adalah sektor pertanian dengan tingkat persentase keluarga pertanian yang sangat tinggi, yaitu diatas 90% dari tiap-tiap desa yang ada di Kecamatan Tompobulu. Demikian pula

dengan keluarga yang anggotanya menjadi buruh tani jumlahnya rata-rata 50% per Desa dari jumlah keluarga yang ada. Buruh tani yang terbanyak yaitu buruh panen padi kemudian ada beberapa anggota keluarga yang bekerja sebagai buruh tanam padi yang lokasi kerjanya sebagian besar di dalam wilayah Kecamatan Tompobulu dan banyak juga yang bekerja sebagai buruh bangunan. Komoditi utama hasil pertanian Kecamatan Tompobulu adalah tanaman padi sawah yang berdampak pada penyebaran usaha industri penggilingan padi di tiap desa.

5. Kehidupan Keberagamaan

Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa merupakan Desa yang memiliki jumlah penduduk keseluruhan beragama Islam sebesar 3.486 jiwa. Sebagian besar penduduk yang tinggal di wilayah ini merupakan penduduk asli yang beragama Islam dan memiliki ikatan keluarga satu sama lain.

6. Latar Sejarah Pembangunan Waduk Karangloe

Pembangunan Waduk Karangloe yang masuk dalam tiga batas wilayah, Gowa, Takalar, Jeneponto masih sangat jauh dari harapan. Pasalnya masih sangat banyak problem internal yang hingga saat ini belum terselesaikan sehingga proyek bendungan ini terbengkalai dari tahun 2013 sampai sekarang. Tujuan pembangunan Waduk Karangloe di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa dan masyarakat Kabupaten Jeneponto yang berada di perbatasan.

Pembangunan Waduk Karangloe tersebut berfungsi sebagai penyedia air baku khususnya area pertanian yang merupakan salah satu penyediaan padi

regional maupun nasional. Bendungan/waduk ini dibuat di wilayah Desa Garing Kecamatan Tompobulu, dan untuk area genangannya akan terbentuk meluas meliputi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Tompobulu dan kecamatan Biringbulu dan tiga Desa satu Kelurahan, yaitu Desa Garing, Desa Taring, Desa Datara dan Kelurahan Tonrorita. Lahan yang digunakan dalam pembangunan Waduk Karangloe tersebut terdiri dari lahan milik masyarakat dan lahan milik pemerintah, lahan milik masyarakat terdiri dari sawah, kebun, permukiman sedangkan lahan milik pemerintah terdiri dari jalanan dan sungai.

Sebagian besar lahan yang digunakan dalam pembangunan waduk Karangloe adalah lahan milik masyarakat. Lahan milik masyarakat yang digunakan untuk pembangunan Waduk Karangloe sudah dibebaskan sebagian dan mendapat biaya ganti rugi dari pemerintah. Lahan yang digunakan dalam pembangunan Waduk Karangloe adalah lahan yang digunakan oleh masyarakat untuk mencari nafkah, seperti lahan pertanian dan lahan perkebunan, sehingga bagi masyarakat yang bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan harus bersiap diri untuk mencari lahan pengganti yang sudah dibebaskan dengan menggunakan uang ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah. Tidak sedikit masyarakat yang terkena dampak langsung dari pembangunan Waduk Karangloe tersebut dari ketiga desa dan satu kelurahan yang digenangi dapat diketahui bahwa Desa Garing menjadi salah satu desa yang terkena dampak yang cukup besar dari pembangunan Waduk Karangloe, sekitar 78 rumah yang tergesur dan 157 kepala keluarga di tiga desa dan satu kelurahan yang kehilangan lahan pertanian dan perkebunan.

Pembebasan lahan milik masyarakat dan belum terealisasikannya dengan baik, berdampak pada mata pencaharian dan kerugian bagi masyarakat. Tergusurnya masyarakat Desa Garing yang menjadi korban dari pembangunan Waduk Karangloe membuat masyarakat harus bersiap diri memulai hidupnya kembali dari awal untuk mencari lapangan pekerjaan dan tempat tinggal.

BAB V

EKSISTENSI MASYARAKAT LOKAL TERGUSUR DAN PEMBANGUNAN WADUK KARANGLOE

A. Eksistensi Masyarakat Lokal Yang Tergusur Akibat Pembangunan Waduk Karangloe

Eksistensi masyarakat yang terdusur dari pembangunan Waduk Karangloe menyinggung masalah bagaimana pengaruh dan keberadaan masyarakat Desa Garing dan sekitarnya, yang berada di Kecamatan Tompobulu. Dalam pembangunan Waduk Karangloe bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa dan masyarakat Kabupaten Jeneponto yang berada di perbatasan.

Pembangunan Waduk Karangloe tersebut berfungsi sebagai penyedia air baku khususnya area pertanian yang merupakan salah satu penyediaan padi *regional* maupun *nasional*. Bendungan /waduk ini dibuat di wilayah Desa Garing Kecamatan Tompobulu, dan untuk area genangannya akan terbentuk meluas meliputi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Tompobulu dan kecamatan Biringbulu dan tiga Desa satu Kelurahan, yaitu Desa Garing, Desa Taring, Desa Datara dan Kelurahan Tonrorita. Dalam pembangunan Waduk Karangloe meskipun memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan, namun disisi lain memiliki kendala tersendiri dalam pembuatannya. Faktor yang menjadi kendala tentunya tak lepas dari penggunaan lahan, yang di mana lahan yang diperuntukkan dalam pembangunan Waduk Karangloe sebagian besar milik masyarakat setempat.

Hal yang menjadi kendala ini, terlahir dari masih banyaknya lahan milik masyarakat yang belum rampung terkait dalam masalah ganti rugi pembebasan

lahan. Eksistensi masyarakat yang muncul terjadi di dalam masyarakat disebabkan belum terealisasinya dengan baik masalah ganti rugi lahan milik masyarakat, sehingga menyebabkan hilangnya mata pencaharian dan masyarakat merasa tergesur dalam pembangunan Waduk Karangloe. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Dahlan selaku tokoh masyarakat di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa menuturkan bahwa:

“Saya sendiri sangat merasa dirugikan, pasalnya realisasi ganti rugi lahan yang saya miliki digunakan dalam pembangunan Waduk Karangloe tidak setara dengan ganti rugi lahan yang digunakan dalam pembangunan Waduk Karangloe. Sehingga saya menolak hasil ganti rugi lahan dari pemerintah dan saya sendiri merasa sangat dirugikan disebabkan lahan saya sudah di bebaskan namun terkait ganti ruginya belum saya terima”. (Hasil wawancara, 22 Desember 2017).

Dari hasil wawancara peneliti menarik kesimpulan bahwa, pembangunan Waduk Karangloe masih memiliki kendala tersendiri, yang utamanya masalah pembebasan lahan. Hal yang dimaksud, masih ada sebagian masyarakat yang belum menerima ganti rugi dari pembebasan lahan milik mereka. Dari keterkendalaan terkait realisasi ganti rugi lahan milik masyarakat, pernah terjadi konflik antara masyarakat dengan pihak BPN dan pihak Balai POMPEGAN berupa aksi masyarakat penuntutan terkait realisasi pembebasan lahan milik masyarakat. Sama halnya Bapak di atas dari penuturan Bapak Dg. Saru' yang mengikuti aksi di kantor BPN dan Balai POMPEGAN menuturkan:

“Saya sendiri sangat mengeluhkan masalah realisasi ganti rugi lahan milik saya, dan sempat langsung memintaka klarifikasi kepada pihak BPN dan pihak Balai POMPEGAN. Dalam pembicaraan antara pihak BPN dan pihak Balai POMPEGAN mengeluhkan ketidak sesuaian luas lahan yang saya miliki, tidak sesuai dengan ganti rugi lahan yang ada di lapangan” (Hasil wawancara, 22 Desember 2017).

Mengingat masalah belum rampungnya realisasi ganti rugi pembebasan lahan milik masyarakat mengakibatkan terkendalanya pembangunan Waduk Karangloe. Peneliti menarik kesimpulan dari hasil wawancara dengan bapak Dg. Saru' diantaranya, terjadi kesimpangsiuran realisasi ganti rugi lahan dan masyarakat merasa dirugikan. Dan masalah yang mengkhawatirkan yaitu masalah pemindahan tempat tinggal (rumah) yang tidak disediakan pemerintah akan realisasi ganti rugi lahan milik masyarakat yang digunakan dalam pembangunan Waduk Karangloe. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Hj. Caya di kediaman beliau, mendapatkan sebuah fakta menarik dalam wawancaranya:

“Selaku salah satu masyarakat yang merasa dirugikan dan tergusur sangat mengeluhkan pembangunan waduk karangloe, pasalnya tujuan pembangunan waduk karangloe jauh dari kenyataan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar waduk dalam pembangunannya. Hal ini saya keluhkan ketidak transparannya dan lambatnya pemerintah dalam realisasi ganti rugi pembebasan lahan. Saya merasa tergusur karena kediaman saya sendiri sudah dibebaskan dalam pembangunan waduk, namun belum mendapat ganti rugi yang sepadan dari pemindahan lokasi. (Hasil wawancara, 22 Desember 2017).

Dari Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Hj. Caya, pihaknya merasa sangat dirugikan, dari keluhannya ketidak transparannya dan lambatnya pemerintah dalam realisasi ganti rugi pembebasan lahan. Sama halnya Ibu Hj. Caya, wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Syarifuddin selaku tokoh masyarakat di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa menuturkan bahwa:

“Menurut saya, pembangunan Waduk Karangloe tidak terlaksana dengan baik karena ada beberapa kendala sehingga proses pengerjaan pembangunan terhambat. Hal itu karenakan masih banyak masyarakat

mengeluh belum mendapat ganti rugi dari lahan yang dibebaskan sebagai tempat pembangunan Waduk Karangloe dan masyarakat tidak tanggung-tanggung menghentikan proses pengerjaan waduk disebabkan dari keluhan masyarakat itu sendiri yang hadir, di antaranya mengeluhkan masalah kompensasi ganti rugi yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan realisasi ganti rugi secara langsung” (Hasil wawancara, 22 Desember 2017).

Wawancara yang berlangsung di kediaman beliau, antara peneliti dan Bapak Syarifuddin mendapatkan hasil wawancara berupa, pembangunan Waduk Karangloe terkendala dalam penyelesaiannya dikarenakan masih banyak masyarakat mengeluh belum mendapat ganti rugi dari lahan yang dibebaskan sebagai tempat pembangunan Waduk Karangloe dan masyarakat tidak tanggung-tanggung menghentikan proses pengerjaan waduk disebabkan dari keluhan masyarakat itu sendiri yang hadir, di antaranya mengeluhkan masalah kompensasi ganti rugi yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan realisasi ganti rugi secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara secara keseluruhan antara peneliti dan masyarakat Desa Garing Kecamatan Tompobulu, peneliti menyimpulkan bahwa pembangunan Waduk Karangloe dan pembesaran lahan pertanian serta tempat tinggal masyarakat sangat merugikan karena pembayaran ganti rugi dari lahan pertanian, tanaman, tempat tinggal dibayar secara tidak sesuai dengan harga kisaran harga tanah yang ada di Kecamatan Tompobulu dan relokasi pemindahan tempat tinggal masyarakat yang tidak disediakan oleh pihak pemerintah.

B. Pembangunan Waduk Karangloe Terhadap Masyarakat Lokal Di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa

Proses dari pembangunan sosial yang dilakukan tidak terlepas dari pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan sosial tidak akan terlepas dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Tujuan dari pembangunan sosial hanya akan tercapai jika pembangunan ekonomi berkembang.

Pembangunan sosial yang dilakukan harus melibatkan berbagai macam disiplin ilmu khususnya ilmu sosial. keberhasilan pembangunan sosial tidak akan terlepas dari peran politik dan ekonomi dari suatu negara. Selain itu juga pembangunan sosial sangat dipengaruhi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Tekanan dari pembangunan sosial lebih kepada proses yang dilakukan dalam pembangunan sosial itu sendiri. Dengan demikian dalam pembangunan sosial harus dilihat tiga aspek yaitu kondisi awal sebelum adanya pembangunan sosial, proses pembangunan itu sendiri yang merupakan proses perubahan sosial, dan kondisi akhir setelah perubahan sosial dilakukan.

Pembangunan sosial merupakan proses yang bersifat progresif, artinya pembangunan yang dilakukan merupakan proses yang bersifat dinamis untuk mencapai kemajuan. Pembangunan sosial diarahkan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Tentunya pembangunan yang dimaksud memberikan dampak tersendiri bagi kondisi sosial masyarakat yang ada, khususnya pembangunan Waduk Karangloe di Desa Garing Kecamatan Tompobulu. Sama halnya penuturan Bapak Sarifuddin, Ibu Hasnah bekerja sebagai ibu rumah tangga dan salah satu masyarakat yang menjadi korban pembangunan waduk yang lahannya difungsikan dalam pembangunan waduk, menuturkan bahwa:

“Saya sendiri merasakan dampak dalam pembangunan Waduk Karangloe berdampak rusaknya mata pencaharian karena sebelumnya lahan yang saya miliki merupakan kebun dan dari hasil kebun itu dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan hasil dari kebun itu sendiri, dapat dijual di pasar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan sampai sekarang saya belum menerima masalah ganti rugi dari pembebasan lahan yang saya miliki dan lahan saya suda tergurus dan tidak bisa dimanfaatkan lagi” (Hasil wawancara, 22 Desember 2017).

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Hasnah di kediaman beliau mendapatkan hasil bahwa pembangunan Waduk Karangloe meberikan dampak buruk bagi masyarakat setempat yang terkena dampak buruk dari pembangunan waduk. Diantaranya berdampak rusaknya mata pencaharian karena sebelumnya lahan yang dimiliki masyarakat, umunya berupa kebun dan dari hasil kebun itu dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan hasil dari kebun itu sendiri, dapat dijual di pasar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan sampai sekarang masyarakat masih banyak belum menerima masalah ganti rugi dari pembebasan lahan yang saya milikinya. Adapun Bapak H. Sukri dalam penuturannya yang sama dengan Ibu Hasna yang menjadi korban pembebasan lahan yang di mana lahan milik diperuntukkan dalam pembangunan Waduk Karangloe mengatakan:

“Dalam pembangunan Waduk Karangloe, lahan yang saya miliki sebesar kurang lebih 4 hakter yang digunakan dalam pembebesan lahan waduk karangloe, yang menjadi keluhan saya sampai saat ini, berupa biaya ganti rugi pembebasan lahan yang belum rampung dan pihak pemerintah sulit memberikan klarifikasi masalah belum rampungnya ganti rugi dari lahan yang saya miliki, padahal lahan yang saya miliki berupa kebun untuk menunjang kebutuhan ekonomi keluarga saya”. (Hasil wawancara, 22 Desember 2017).

Dari hasil wawancara dengan Bapak H. Sukri di kediaman beliau peneliti menarik kesimpulan bahwa, biaya ganti rugi pembebasan lahan yang belum

rampung dan pihak pemerintah sulit memberikan klarifikasi masalah belum rampungnya ganti rugi dari lahan yang dimiliki masyarakat. Hilangnya lahan milik masyarakat tentunya merusak kondisi sosial yang ada karena sebelumnya lahan yang digunakan dalam pembuatan waduk sebelumnya adalah tempat tinggal dan kebun-kebun milik masyarakat. Sama halnya penuturannya dengan Bapak H. Nai' dalam wawancaranya, mengatakan:

“Hilangnya lahan pertanian yang dipakai untuk mencari nafkah sehingga pendapatan mata pencaharian dari hasil kebun menurun karena sudah dibebaskan oleh pemerintah, meskipun sampai saat ini saya masih terkendala terkait mendapatkan ganti rugi dari lahan saya. (Hasil wawancara, 22 Desember 2017).

Masalah ganti rugi yang diberikan untuk masyarakat dan tidak terealisasinya dengan baik peneliti menarik kesimpulan berupa, hilangnya lahan pertanian yang dipakai untuk mencari nafkah sehingga pendapatan mata pencaharian dari hasil kebun dan peternakan menurun karena sudah dibebaskan oleh pemerintah. Dan yang mengkhawatirkan dari terkendalanya realisasi ganti rugi pemerintah buat masyarakat, sebagian warga terpaksa membangun rumah sementara jauh dari kelayakan sebagai tempat tinggal. Seperti halnya diatas Dg. Lewa salah satu warga yang terkena dampak pembangunan Waduk Karangloe yang di mana tempat tinggal sementara yang dia bangun jauh dari kelayakan, menuturkan:

“Hilangnya tempat tinggal meskipun saya diberi ganti rugi sebagai biaya relokasi tempat tinggal, namun ganti rugi yang saya terima sangat jauh dari harga tanah yang saya beli sebagai tempat tinggal yang baru” (Hasil wawancara, 22 Desember 2017).

Dari wawancara peneliti dengan Bapak Dg. Lewa, peneliti menarik kesimpulan bahwa, warga merasa tergusur dari dampak pembangunan waduk

dikarenakan hilangnya tempat tinggal yang sebelumnya di tempati. Dari keseluruhan, peneliti menarik kesimpulan bahwa pembangunan waduk karangloe di desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa sangat tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan waduk karena hilangnya lahan pertanian sebagai lahan mencari nafkah dan tempat tinggal, hal ini merusak kondisi sosial yang ada sebelumnya.

BAB VI

EKSISTENSI MASYARAKAT LOKAL YANG TERGUSUR SEBUAH PEMBAHASAN TEORETIS

Hasil penelitian dan observasi yang telah peneliti lakukan maka teori yang relevan berkaitan dengan pembahasan yaitu teori pembangunan, teori fungsional struktural, dan teori konflik yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Penelitian dan observasi yang telah peneliti lakukan maka teori yang relevan berkaitan dengan pembahasan yaitu teori pembangunan, teori fungsional struktural, dan teori konflik yang telah dibahas pada bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah terkait eksistensi masyarakat lokal yang tergusur dan dampak pembangunan Waduk Karangloe di Desa Garing Kecamatan Tompobulu.

Menyinggung masalah pembangunan tentunya tak lepas dari teori pembangunan, teori fungsional struktural, dan teori konflik pada umumnya dalam kegiatan pembangunan, baik itu dalam kondisi pra dan paska dari kegiatan pembangunan itu sendiri.

b. Teori Pembangunan

Konsep teori pembangunan dipopuler oleh Midgley salah satu tokoh teorites. Pembangunan sosial menurut Midgley (1995; 250) adalah “*a process of planner social change designed to promote the well-being of thw population as a whole in conjunction with a dynamic process of development*”. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Midgley tersebut terlihat bahwa pembangunan sosial ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat.

Peningkatan taraf hidup masyarakat tersebut tidak dapat dilakukan tanpa adanya keterkaitan dengan pembangi

Midgley bahwa pembangunan sosial tidak akan dapat dijalankan tanpa adanya keterpaduan dengan pembangunan ekonomi. Perencanaan dalam pembangunan sosial harus juga membuat perencanaan pembangunan ekonomi.

Hubungan yang erat antara pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan menjadikan keduanya tidak akan terlepas dari pembangunan ekonomi. Kolaborasi antara pembangunan sosial (dalam hal ini sebagai pembangunan kesejahteraan sosial) dengan pembangunan ekonomi akan memperlihatkan sebuah negara apakah termasuk negara sejahtera atau negara tidak sejahtera. Keterkaitan teori pembangunan menunjukkan adanya penyelesaian dalam menganalisis masalah pertama yaitu bagaimana eksistensi masyarakat lokal yang tergeser akibat pembangunan Waduk Karangloe di Desa Garing Kecamatan Tompobulu.

c. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori ini menekankan kepada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik serta perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan .

Teori fungsionalisme struktural, yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons, merupakan teori dalam paradigma fakta sosial dan paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang, sehingga dapat disinonimkan dengan sosiologi (Ritzer, 2005:117). Teori ini memfokuskan kajian pada struktur makro (sosiologi makro) yakni pada sistem sosial, yang melalui teori ini Parsons menunjukkan pergeseran dari teori tindakan ke fungsionalisme struktural. Kekuatan teoretis Parsons terletak pada kemampuannya melukiskan hubungan antara struktur sosial berskala besar

dan pranata sosial (Ritzer 2005:82). Bangunan teori fungsionalisme struktural Parsons banyak terpengaruh oleh pemikiran Durkheim, Weber, Freud dan Pareto, dan yang disebut terakhir inilah yang paling besar pengaruhnya bagi pengembangan teori fungsionalisme struktural, terutama gagasan Pareto tentang masyarakat yang dilihatnya dalam hubungan sistem (Ritzer, 2011:280). Konsepsi Pareto yang sistematis tentang masyarakat, yang dipandang sebagai sebuah sistem yang berada dalam keseimbangan, yakni kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung, sehingga perubahan satu bagian dipandang menyebabkan perubahan lain dari sistem, dan dilebur dengan pandangan Comte, Durkheim dan Spencer yang menganalogikan masyarakat dengan organisme, memainkan peran sentral dalam pengembangan teori fungsionalisme struktural Parsons (Ritzer, 2005:54-55).

Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Penganut teori ini cenderung untuk melihat hanya kepada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dapat menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Maka jika terjadi konflik, penganut teori fungsionalisme struktural memusatkan perhatiannya kepada

masalah bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan.

Singkatnya adalah masyarakat menurut kaca mata teori (fungsional) senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan. Setiap peristiwa dan setiap struktur fungsional bagi sistem sosial itu. Demikian pula semua institusi yang ada, diperlukan oleh sosial itu, bahkan kemiskinan serta kepinganan sosial sekalipun. Masyarakat dilihat dalam kondisi, dinamika dalam keseimbangan. Keterkaitan teori struktural fungsional menunjukkan adanya penyelesaian dalam menganalisis masalah yaitu bagaimana dampak pembangunan Waduk Karangloe terhadap masyarakat lokal di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

3. Teori Konflik

Tokoh utama Teori Konflik adalah Ralp Danrendorf. Menurut Teori Fungsionalisme Struktural masyarakat berada dalam kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan, maka menurut Teori Konflik malah sebaliknya. Kalau menurut Teori Fungsionalisme Struktural setiap elemen atau setiap institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas, maka Teori Konflik melihat bahwa setiap elemen atau institusi memberikan sumbangan terhadap disintegrasikan sosial. Kontras lainnya adalah bahwa penganut Teori Fungsionalisme Struktural melihat anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum, maka Teori Konflik menilai

keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan atas golongan yang berkuasa.

Dahrendorf membedakan golongan yang terlibat konflik itu atas dua tipe. Kelompok semu (*quasi group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok semu merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok-kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok dua, yakni kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat.

Mengenai fungsi dari adanya konflik, Berghe mengemukakan ada empat hal: (1) Sebagai alat untuk solidaritas; (2) Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain; (3) Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi; (4) Fungsi komunikasi. Sebelum sebuah konflik kelompok tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Tapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Individu dan kelompok tahu secara pasti di mana mereka berdiri, dan karena itu dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak dengan lebih tepat.

Teori Konflik ini ternyata terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat dalam masyarakat di samping konflik itu sendiri. Masyarakat selalu dipandang dalam kondisi konflik. Mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya

keseimbangan dalam masyarakat. Masyarakat seperti tidak pernah aman dari pertikaian dan pertentangan. Keterkaitan teori konflik menunjukkan adanya penyelesaian dalam konflik dari pembangunan Waduk Karangloe terhadap masyarakat lokal di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

Dari keseluruhan penggunaan teori diatas dirangkai dalam bentuk penyelesaian masalah dalam melakukan kegiatan pembangunan jangka panjang, yang memiliki arah pembangunan yang bersifat fungsional dan pembangunan yang bersifat transisi yang meningkatkan kesejahteraan, tanpa merusak aspek sosial yang ada sebelumnya.

Pembangunan sosial yang dilakukan harus melibatkan berbagai macam disiplin ilmu khususnya ilmu sosial. keberhasilan pembangunan sosial tidak akan terlepas dari peran politik dan ekonomi dari suatu negara. Selain itu juga pembangunan sosial sangat dipengaruhi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Tekanan dari pembangunan sosial lebih kepada proses yang dilakukan dalam pembangunan sosial itu sendiri. Dengan demikian dalam pembangunan sosial harus dilihat tiga aspek yaitu kondisi awal sebelum adanya pembangunan sosial, proses pembangunan itu sendiri yang merupakan proses perubahan sosial, dan kondisi akhir setelah perubahan sosial dilakukan.

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari penelitian yang telah di laksanakan di desa garing kecamatan tompobulu kabupaten gowa peneliti menarik kesimpulan berupa:

1. Eksistensi masyarakat lokal yang tergusur dari pembangunan Waduk Karangloe di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa terlihat dari keberadaan pembangunan waduk dan kondisi sosial masyarakat yang ada. Di mana masyarakat mengeluh dan melakukan protes kepada pihak pemerintah terkait masalah realisasi ganti rugi lahan yang dibebaskan.
2. Dampak pembangunan waduk karangloe terhadap masyarakat lokal, mengacu pada rusaknya kondisi sosial yang ada pada masyarakat di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Dalam pembangunan Waduk Karangloe merusak mata pencaharian masyarakat dan menelantarkan masyarakat Desa Garing, dimana lahan yang sebelumnya berupa lahan pertanian, perkebunan dan pemukiman yang dibebaskan dalam pembangunan Waduk Karangloe.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Pembangunan waduk karangloe di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa dan masyarakat Kabupaten Jeneponto yang berada di perbatasan. Pembangunan Waduk Karangloe tersebut berfungsi sebagai penyedia air baku khususnya area pertanian yang merupakan salah satu penyediaan padi regional maupun nasional.

2. Bagi Pemerintah

Khususnya Pemerintah Kabupaten Gowa serta pemerintah negara yang bertugas sebagai selaku kontrol pelaksana serta mengetahui, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu mengetahui dan memperhatikan kondisi sosial yang ada sebelum pelaksanaan proyek pembangunan Waduk Karangloe.

3. Bagi Lembaga Terkait

Kepada Badan Pertanahan Nasional dan Balai Besar Pompengan selaku pemegang kebijakan dalam pembebasan lahan milik masyarakat Desa Garing sekitarnya yang berada di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu terlebih dahulu menyelesaikan masalah relokasi dan ganti rugi pembebasan lahan milik masyarakat sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan proyek Waduk Karangloe.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah referensi sebagai bahan kajian tentang eksistensi masyarakat yang terdusur dan menjadi proses penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, zaenal. (2007). *Analisis Eksistensial, Sebuah Pendekatan Alternative untuk Psikologis dan Psikiatri*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Antonius. (2002). *Pengaruh Kemandirian Terhadap Interaksi Sosial pada Remaja*. Semarang : Universitas Katolik Soegijapranata.
- Amilia, Muthi. (2016). *Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Jatigede di Desa Wado*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Friendlander, W. (1974) *Introduction to Sosial Welfare* (Pengantar Sosial Kesejahteraan) (Penerjemah Indra Kurniawan). Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Isniawansyah, Mochamad Fajar. (2005). *Kesiapan Masyarakat dalam Menghadapi Rencana Pembangunan Waduk Kuningan*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Maftuh, Bunyamin. (2005) *Implementasi Model Pembelajaran Resolusi Konflik melalui Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Midgley, James. (2005) *Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Indonesia Bardikari.
- Nasution, S. (1982). *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- (1988). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Ritzer, George. (2005) *Teori Sosial PostModern*. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- (2011) *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Pradigma Ganda*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Grafindos.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : PT. Alfabeta.

Taneko, Soeleman B. (1984) *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta:CV. Rajawali.

DOKUMENTASI Pengerjaan Waduk Karangloe



Gambar 1: proses penggalian waduk karangloe



Gambar 2: proses penggalian waduk karangloe



Gambar 3: pembuatan torongan waduk karangloe



Gambar 4: pembuatan torongan waduk karangloe



Gambar 5: pembuatan torongan waduk karangloe



Gaambar 6: pengecoran torongan waduk karangloe



Gambar 7: wawancara dengan masyarakat yang terkena penggusuran waduk karangloe



Gambar 8: wawancara dengan masyarakat yang terkena penggusuran waduk karangloe

No	Sasaran	Pertanyaan
1	Dinas Terkait dan Pengambil Kebijakan	1. Apa yang anda ketahui tentang pembangunan Waduk Karangloe di Desa Garring?
		2. Apa tujuan dari pembangunan Waduk Karangloe?
		3. Bagaimana peran pemerintah setempat terhadap pengurusan yang terjadi di Desa Garing?
		4. Bagaimana proses pengadaan tanah terhadap masyarakat lokal dengan pemerintah?
		5. Faktor apa yang mempengaruhi masyarakat sehingga masih banyak yang belum mendapatkan ganti rugi?
2	Konsultan Lapangan	1. Bagaimana proses pembangunan Waduk Karangloe?
		2. Apa tujuan dan mamfaat dari pembangunan Waduk Karangloe?
		3. Adakah faktor kendala dalam proses pembangunan Waduk Karangloe?
3	Masyarakat dan Tokoh Masyarakat	1. Bagaimana pandangan anda tentang pembangunan Waduk Karangloe?
		2. Dampak apa saja yang terjadi dalam pembangunan Waduk Karangloe?
		3. Apakah anda mendapatkan ganti rugi yang sesuai, dengan yang dijanjikan oleh pemerintah?
		4. Bagaimana kehidupan anda setelah terjadi pengurusan?
		5. Bagaimana jalannya proses relokasi ganti rugi yang diberikan pemerintah, terkait masyarakat yang

RIWAYAT HIDUP



M. JUFRI HS, Lahir di Bangkentabbing, Kab. Gowa, pada tanggal 04 Mei 1995. Anak pertama dari dua bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan H. M. Sukri dan Hj. Sari. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di MIS Yapip Rajaya mulai tahun 2001 sampai tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Biringbulu, Kab. Gowa dan tamat pada tahun 2010. Selanjutnya, SMAN 1 Tompobulu, Kab. Bantaeng merupakan tempat untuk menyelesaikan jenjang SMA pada tahun 2013.

Kemudian pada tahun 2013 penulis berhasil lulus pada Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar program strata 1 (S1) kependidikan dan menyelesaikan studi pada tahun 2018 dengan gelar serjana pendidikan.

Setiap pencapaian seorang hamba adalah rahmat dari Allah swt disertai iringan doa dari kedua orang tua dan keluarga. Sehingga perjuangan penulis yang disertai suka duka dalam menjalani pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dapat diselesaikan dengan judul skripsi “Eksistensi Masyarakat Lokal yang Tergusur (Studi Kasus Pembangunan Waduk Karangloe di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)”.

